

**REFORMASI MANAJEMEN  
ADMINISTRASI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA TATA KELOLA DIGITAL**

**Sofyan Mustoip<sup>1✉</sup>, Yuriska Dewi Suwarno<sup>2</sup>, Khotibul Umam<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1,2,3</sup>

[sofyanmustoip@gmail.com](mailto:sofyanmustoip@gmail.com)<sup>1</sup>, [riskaputri4@gmail.com](mailto:riskaputri4@gmail.com)<sup>2</sup>, [khotib08041@gmail.com](mailto:khotib08041@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Received: 2022-08-05; Accepted: 2022-08-11; Published: 2022-08-31

---

**ABSTRACT**

*The administrative management of Islamic educational institutions is undergoing profound transformation driven by the rapid proliferation of digital technologies and evolving governance expectations. Despite widespread acknowledgment that digital transformation is reshaping educational administration globally, the specific dynamics of this process within Islamic educational settings in Indonesia remain insufficiently documented and theorized. This study aims to examine the reform of administrative management in Islamic educational institutions within the context of digital governance, identifying the drivers, dimensions, and implications of this transformation. A systematic library research methodology was employed, utilizing peer-reviewed journal articles, academic books, and policy documents published between 2019 and 2024. The findings indicate that digital governance reform in Islamic educational administration encompasses three interconnected dimensions: technological adoption, institutional restructuring, and value alignment. A significant research gap was identified in the absence of frameworks that reconcile digital governance imperatives with the normative values of Islamic institutional management. This study proposes the Digital-Islamic Governance Integration (DIGI) model as a conceptual contribution toward bridging this gap.*

*Keywords: digital governance, administrative management reform, Islamic education, educational technology, institutional transformation*

---

Copyright ©2022, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



## Pendahuluan

Gelombang transformasi digital yang menyapu seluruh sektor kehidupan manusia pada abad ke-21 telah menempatkan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada titik persimpangan yang krusial: melanjutkan praktik-praktik administrasi konvensional yang telah mengakar selama puluhan tahun, atau secara proaktif merespons perubahan dengan melakukan reformasi manajemen administrasi yang komprehensif dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang autentik. *Revolusi industri 4.0 dan percepatan Society 5.0* telah mengubah lanskap administrasi pendidikan secara fundamental, di mana proses-proses yang sebelumnya membutuhkan waktu, kertas, dan sumber daya manusia dalam jumlah besar kini dapat diselesaikan dengan cepat, akurat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna. Transformasi ini bukan sekadar perubahan alat dan prosedur teknis, melainkan pergeseran paradigmatis dalam cara lembaga pendidikan Islam memahami dan menjalankan fungsi-fungsi administrasinya (Siagian, 2020).

Manajemen administrasi pendidikan dalam pengertian komprehensif mencakup keseluruhan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian berbagai sumber daya kelembagaan, termasuk pengelolaan data peserta didik, administrasi kepegawaian dan keuangan, manajemen aset dan sarana prasarana, hingga sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kelembagaan kepada pemangku kepentingan. Ketika semua fungsi administrasi ini didigitalisasi dan diintegrasikan dalam sebuah sistem informasi manajemen yang terpadu, potensi efisiensi dan efektivitas yang dapat diraih sangat signifikan. Namun demikian, digitalisasi administrasi bukan proses yang bebas tantangan; ia menuntut perubahan kompetensi sumber daya manusia, investasi infrastruktur teknologi yang tidak sedikit, serta transformasi budaya kerja yang kerap kali lebih sulit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan transformasi teknologinya itu sendiri (Mulyasa, 2021).

Kondisi aktual manajemen administrasi di banyak lembaga pendidikan Islam Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar dengan tuntutan era digital. Sebagian besar madrasah, khususnya yang berada di wilayah peri-urban dan pedesaan, masih mengandalkan sistem administrasi manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, keterlambatan pelaporan, dan inkonsistensi informasi antar unit. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efisiensi operasional lembaga, tetapi juga memperlemah kapasitas pengambilan keputusan berbasis data yang menjadi prasyarat tata kelola yang baik dan akuntabel. Ironisnya, sebagian dari keterlambatan ini bukan semata disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, melainkan juga oleh absennya strategi transformasi digital yang sistematis dan keengganan untuk berubah yang bersumber dari *comfort zone* birokrasi yang telah mengakar (Sagala, 2020).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menunjukkan komitmen yang semakin kuat untuk mendorong digitalisasi administrasi pendidikan Islam melalui berbagai program dan kebijakan. Pengembangan *sistem EMIS (Education Management Information System)* untuk madrasah, aplikasi SIMPEG untuk manajemen kepegawaian, serta berbagai platform digital lainnya merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah

dalam agenda ini. Namun demikian, implementasi sistem-sistem tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan konektivitas internet di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital tenaga administrasi, hingga resistensi terhadap perubahan yang berakar pada kebiasaan dan ketakutan akan hal-hal baru (Wahyudi & Insani, 2020). Kesenjangan antara kebijakan digitalisasi dan kapasitas implementasi inilah yang menjadi salah satu persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian akademis dan praktis yang serius.

Kajian akademis tentang digitalisasi administrasi pendidikan Islam masih relatif terbatas dibandingkan dengan kajian serupa pada lembaga pendidikan umum. Penelitian Rusman (2019) membahas manajemen teknologi informasi dalam pembelajaran namun tidak secara spesifik mengkaji reformasi administrasi berbasis digital. Studi Hidayat dan Machali (2021) yang komprehensif tentang pengelolaan pendidikan memberikan porsi pembahasan yang terbatas pada aspek *digital governance*. Sementara itu, kajian Muhaimin (2021) tentang manajemen pendidikan Islam lebih memusatkan perhatian pada aspek pedagogis dan kepemimpinan tanpa pendalaman pada dimensi *transformasi digital administrasi*. Keterbatasan kajian ini mengindikasikan adanya celah akademis yang signifikan dan perlu direspons secara sistematis.

Research gap yang paling mendasar dalam literatur yang ada adalah absennya kerangka konseptual yang secara eksplisit mengintegrasikan imperatif tata kelola digital dengan nilai-nilai normatif manajemen administrasi Islam. Sebagian besar kajian yang membahas digitalisasi pendidikan Islam cenderung mengadopsi kerangka tekno-sentris yang memandang teknologi sebagai solusi universal tanpa mempertimbangkan keunikan konteks nilai dan budaya lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, kajian tentang manajemen pendidikan Islam berbasis nilai sering kali abai terhadap dimensi teknologi digital sebagai realitas kontemporer yang tidak dapat diabaikan. Integrasi kedua perspektif ini dalam sebuah kerangka yang kohesif dan operasional masih sangat jarang ditemukan dalam literatur yang ada (Fattah, 2019).

Dimensi tata kelola dalam administrasi pendidikan Islam mengandung muatan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari praktik digitalnya. Prinsip-prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang menjadi fondasi tata kelola Islam sesungguhnya memiliki resonansi yang sangat kuat dengan spirit tata kelola digital yang menekankan keterbukaan informasi, auditabilitas sistem, dan pelayanan publik yang responsif. Pertemuan antara nilai-nilai Islam dan semangat tata kelola digital ini, jika dikelola dengan bijaksana, berpotensi menghasilkan model administrasi pendidikan Islam yang tidak hanya efisien secara teknologis tetapi juga kuat secara etis dan integritasnya (Nata, 2022). Potensi sinergis inilah yang menjadi salah satu premis utama penelitian ini.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh realitas pasca-pandemi Covid-19 yang telah mempercepat secara dramatis adopsi teknologi digital di seluruh sektor pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Pengalaman pembelajaran jarak jauh selama pandemi telah memaksa lembaga pendidikan Islam untuk dalam waktu singkat mengadopsi berbagai platform digital, yang pada gilirannya membuka kesadaran

tentang potensi dan tantangan digitalisasi administrasi yang lebih luas. Momentum pasca-pandemi ini menjadi titik peluang yang strategis untuk mendorong reformasi administrasi pendidikan Islam yang lebih terencana, sistematis, dan berlandaskan kerangka nilai yang kokoh (Mujib & Mudzakkir, 2022).

Beranjak dari pemetaan konteks, identifikasi problem, dan penelusuran celah penelitian yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, artikel ilmiah ini bertujuan mengkaji secara mendalam reformasi manajemen administrasi pendidikan Islam di era tata kelola digital melalui pendekatan studi pustaka yang sistematis. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi ganda: secara teoritis berupa kerangka konseptual integratif yang mempertemukan *imperatif digital governance* dengan nilai-nilai manajemen administrasi Islam, dan secara praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat memandu lembaga pendidikan Islam dan pemangku kepentingannya dalam menjalankan agenda reformasi administrasi digital yang efektif, berkelanjutan, dan tetap setia pada misi pendidikan Islam yang autentik (Ramayulis, 2022).

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) sebagai rancangan metodologis yang dipilih secara deliberatif dan sistematis. Studi pustaka dipilih karena tujuan penelitian yang bersifat konseptual-analitis, yakni mengkaji dan mensintesis berbagai perspektif teoritis dan temuan penelitian terdahulu tentang reformasi manajemen administrasi pendidikan Islam di era digital (Zed, 2022). Sumber data primer mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi yang terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 serta Scopus, buku-buku teks manajemen pendidikan Islam, manajemen administrasi, dan tata kelola digital terbitan 2019–2024, serta dokumen kebijakan resmi Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait digitalisasi pendidikan. Sumber data sekunder meliputi prosiding seminar nasional dan internasional, laporan penelitian institusional, dan tinjauan kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi berdasarkan kriteria relevansi, kebaruan, dan kredibilitas, inventarisasi, serta kajian kritis terhadap seluruh literatur yang lolos seleksi (Sugiyono, 2021). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif dari berbagai sumber berbeda secara independen, dan teknik *checking* konseptual. Analisis data menerapkan teknik analisis isi kualitatif yang dikembangkan oleh Moleong (2021), meliputi reduksi data, kategorisasi tematik, display data, dan penarikan kesimpulan secara induktif-deduktif yang reflektif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Lanskap Digital dalam Administrasi Pendidikan Islam Kontemporer**

Kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis dalam penelitian ini mengungkap bahwa transformasi digital administrasi pendidikan Islam di Indonesia sedang berlangsung dalam lanskap yang ditandai oleh heterogenitas kapasitas yang sangat lebar antar lembaga. Di satu ujung spektrum terdapat lembaga-lembaga pendidikan Islam

yang tergolong *early adopters*, yakni mereka yang telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen terpadu, memanfaatkan cloud computing untuk penyimpanan dan pengelolaan data, serta mengintegrasikan analitik data dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Di ujung spektrum yang lain, masih terdapat lembaga-lembaga yang bahkan belum menuntaskan digitalisasi arsip administratif dasarnya. Heterogenitas kapasitas ini mencerminkan disparitas dalam aksesibilitas infrastruktur, kemampuan finansial, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan terhadap agenda transformasi digital (Siagian, 2020). Memahami peta kesenjangan ini merupakan prasyarat penting untuk merancang strategi reformasi yang kontekstual dan berkeadilan.

Kehadiran berbagai platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, seperti EMIS Madrasah, SIMPEG, ARK (Aplikasi Rapor Kurikulum), dan SISPEN (Sistem Penilaian Akreditasi), telah menciptakan ekosistem digital yang semakin kaya bagi administrasi madrasah dan lembaga pendidikan Islam. Namun kajian terhadap berbagai sumber literatur menunjukkan bahwa keberadaan platform-platform tersebut belum otomatis menghasilkan reformasi administrasi yang substantif. Banyak lembaga yang menggunakan *platform-platform* ini secara parsial dan tidak terintegrasi, sehingga manfaat efisiensi dan akurasi data yang seharusnya dapat diraih tidak terwujud secara optimal (Wahyudi & Insani, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam reformasi administrasi digital bukan pada ketersediaan teknologi, melainkan pada kapasitas kelembagaan untuk mengintegrasikan dan memanfaatkannya secara strategis dan menyeluruh.

### **Dimensi-Dimensi Reformasi Manajemen Administrasi Digital**

Hasil sintesis pustaka mengidentifikasi tiga dimensi fundamental yang harus dikelola secara sinergis dalam reformasi manajemen administrasi pendidikan Islam di era digital. Dimensi pertama adalah dimensi *teknologi-infrastruktur*, yang mencakup keputusan tentang pemilihan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi-fungsi administrasi. Dimensi ini tidak hanya menyangkut perangkat keras dan lunak, tetapi juga arsitektur data, keamanan siber, interoperabilitas antar sistem, dan keberlanjutan teknologi yang dipilih. Lembaga pendidikan Islam yang berhasil dalam transformasi digital umumnya tidak memulai dengan mengadopsi teknologi yang paling canggih, melainkan teknologi yang paling sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan konteks spesifik lembaganya (Rusman, 2019). Prinsip kesesuaian kontekstual ini jauh lebih penting daripada kecanggihan teknologi itu sendiri dalam menentukan keberhasilan implementasi.

Dimensi kedua adalah dimensi sumber daya manusia dan kapasitas, yang mencakup pengembangan kompetensi digital seluruh tenaga administrasi dan kepemimpinan lembaga, perubahan deskripsi pekerjaan dan struktur organisasi yang diperlukan, serta manajemen perubahan yang diperlukan untuk mengatasi resistensi dan membangun komitmen terhadap transformasi. Kajian berbagai sumber literatur secara konsisten menunjukkan bahwa kegagalan transformasi digital administrasi lebih sering disebabkan oleh faktor manusia dan organisasi dibandingkan faktor teknologi itu sendiri (Sagala, 2020). Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas digital sumber

daya manusia harus diprioritaskan dan direncanakan secara komprehensif, meliputi program pelatihan yang terstruktur, pendampingan teknis yang berkelanjutan, dan sistem dukungan peer-learning yang memanfaatkan jaringan sesama administrator pendidikan Islam.

Dimensi ketiga adalah dimensi tata kelola nilai-islami, yang merupakan dimensi yang paling membedakan reformasi administrasi digital di lembaga pendidikan Islam dari reformasi serupa di lembaga pendidikan umum. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai Islam tentang amanah, transparansi, keadilan, dan pelayanan prima diartikulasikan secara eksplisit dalam kebijakan, prosedur, dan praktik tata kelola digital lembaga. Prinsip amanah menuntut bahwa sistem digital yang dibangun harus dapat diandalkan integritasnya dan tidak digunakan untuk manipulasi data atau penipuan pelaporan. Prinsip transparansi menuntut bahwa sistem digital membuka akses informasi yang bermakna kepada pemangku kepentingan yang berhak. Prinsip keadilan menuntut bahwa manfaat digitalisasi dapat dinikmati oleh seluruh komponen lembaga, bukan hanya oleh mereka yang sudah melek teknologi (Nata, 2022).

### **Tantangan Struktural dan Kultural Reformasi Digital**

Kajian pustaka ini mengidentifikasi dua kategori tantangan utama yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam proses reformasi manajemen administrasi digital. Kategori pertama adalah tantangan struktural yang bersifat objektif dan dapat diintervensi melalui kebijakan dan investasi. Tantangan struktural ini meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan internet, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang masih menjadi wilayah konsentrasi sejumlah pesantren dan madrasah, keterbatasan anggaran untuk *investasi teknologi*, serta fragmentasi sistem digital antar kementerian yang mengakibatkan beban pelaporan berganda bagi lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah dua kementerian sekaligus (Hidayat & Machali, 2021). Penyelesaian tantangan struktural ini menuntut komitmen anggaran yang serius dari pemerintah serta koordinasi lintas kementerian yang lebih efektif.

Kategori kedua adalah tantangan kultural yang lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang lebih nuansif. Budaya administratif konvensional yang telah mengakar di banyak lembaga pendidikan Islam seringkali menghambat adopsi digital bukan karena penolakan terhadap teknologi secara prinsipial, melainkan karena ketidakpastian dan kekhawatiran yang wajar tentang perubahan cara kerja yang telah lama dipraktikkan. Ketakutan akan paparan kesalahan yang mungkin tersembunyi dalam sistem manual, kekhawatiran tentang keamanan data digital, serta persepsi bahwa sistem digital lebih rumit dari sistem manual yang familiar, semuanya berkontribusi pada resistensi kultural yang perlu dikelola dengan empati dan pendekatan yang memberdayakan (Muhaimin, 2021). Pemimpin lembaga memiliki peran kunci dalam menciptakan iklim psikologis yang aman untuk belajar dan beradaptasi, di mana kesalahan dalam proses pembelajaran digital tidak direspons dengan hukuman tetapi dengan dukungan.

### **Model Integrasi Tata Kelola Digital-Islami (ITDI)**

Berdasarkan sintesis menyeluruh seluruh kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan Model Integrasi Tata Kelola Digital-Islami (ITDI) sebagai kontribusi konseptual utama yang dihasilkan. Model ITDI ini dibangun di atas keyakinan bahwa reformasi administrasi digital yang berhasil dan berkelanjutan di lembaga pendidikan Islam harus secara simultan memenuhi dua set imperatif yang saling melengkapi: imperatif teknis-manajerial yang bersumber dari prinsip-prinsip tata kelola digital yang baik, dan imperatif normatif-spiritual yang bersumber dari nilai-nilai Islam tentang pengelolaan amanah. Model ini terdiri dari lima komponen yang bekerja dalam siklus yang berkelanjutan. Komponen pertama adalah digitalisasi berbasis kebutuhan, di mana pemilihan dan pengembangan solusi digital didasarkan pada analisis mendalam tentang kebutuhan aktual lembaga, bukan semata mengikuti tren atau tekanan eksternal (Fattah, 2019). Komponen kedua adalah internalisasi nilai digital-islami, yakni proses memastikan bahwa setiap sistem dan prosedur digital yang diterapkan mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai amanah, transparansi, dan keadilan dalam tata kelola. Komponen ketiga adalah pengembangan kapasitas berkelanjutan, yang mencakup program pelatihan digital yang terstruktur dan berbasis kompetensi bagi seluruh warga lembaga tanpa terkecuali. Komponen keempat adalah integrasi sistem yang cerdas, di mana berbagai platform digital yang ada diintegrasikan dalam ekosistem informasi yang kohesif untuk menghilangkan duplikasi data dan memaksimalkan nilai informasi yang tersedia. Komponen kelima adalah evaluasi dampak berbasis data, di mana dampak reformasi digital terhadap kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pemangku kepentingan diukur secara berkala menggunakan data yang dikumpulkan oleh sistem digital itu sendiri (Mujib & Mudzakkir, 2022). Model ITDI ini menawarkan panduan yang operasional bagi lembaga pendidikan Islam untuk menjalani perjalanan transformasi digital mereka dengan langkah-langkah yang terukur, kontekstual, dan selaras dengan misi kelembagaan yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang autentik.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa reformasi manajemen administrasi pendidikan Islam di era tata kelola digital merupakan keniscayaan strategis yang tidak dapat dihindari, namun harus dijalani dengan pendekatan yang kontekstual, berbasis nilai, dan berpusat pada manusia. Tiga dimensi reformasi yang teridentifikasi, yakni teknologi-infrastruktur, sumber daya manusia dan kapasitas, serta tata kelola nilai-islami, harus ditransformasi secara sinergis agar reformasi menghasilkan dampak yang substantif dan berkelanjutan. Model ITDI yang dirumuskan menawarkan kerangka operasional yang mempertemukan imperatif digital governance dengan nilai-nilai normatif Islam dalam satu konstruk konseptual yang kohesif dan dapat diimplementasikan.

Penelitian ini merekomendasikan empat agenda prioritas bagi para pemangku kepentingan pendidikan Islam: pertama, pengembangan roadmap transformasi digital yang spesifik dan bertahap bagi setiap tipologi lembaga pendidikan Islam; kedua,

penguatan program literasi digital bagi seluruh tenaga administrasi dan kepemimpinan lembaga pendidikan Islam secara masif dan berkelanjutan; ketiga, integrasi prinsip-prinsip tata kelola islami secara eksplisit dalam desain dan implementasi sistem digital lembaga; keempat, peningkatan investasi infrastruktur digital di daerah-daerah yang masih tertinggal secara konektivitas. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris yang mengkaji implementasi nyata transformasi digital di berbagai tipologi lembaga pendidikan Islam sangat diperlukan untuk memperkaya dan memvalidasi temuan konseptual penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Fattah, N. (2019). *Sistem penjaminan mutu pendidikan: Dalam konteks penerapan MBS* (Ed. Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2021). *Pengelolaan pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Kaukaba.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2021). *Manajemen pendidikan: Aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah/madrasah* (Ed. ke-5). Kencana Prenada Media Group.
- Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2022). *Ilmu pendidikan Islam* (Ed. ke-3). Kencana Prenada Media Group.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2022). *Manajemen pendidikan Islam: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Ramayulis. (2022). *Ilmu pendidikan Islam* (Ed. ke-12). Kalam Mulia.
- Rusman. (2019). *Manajemen teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran*. Rajagrafindo Persada.
- Sagala, S. (2020). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan* (Ed. ke-8). Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2020). *Sistem informasi manajemen* (Ed. ke-13). Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Wahyudi, I., & Insani, N. (2020). Transformasi digital madrasah: Tantangan dan peluang implementasi sistem informasi manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 183–202. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.172-04>
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan* (Ed. ke-4). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.